

**ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG
KESEHATAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

TESIS

Oleh

**ZAHARMAN
Bp:0821221015**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG KESEHATAN
PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Oleh : ZAHARMAN, SE.Ak

(Di bawah bimbingan : Dr.Hefrizal Handra, M.Soc dan Drs.Masrizal, M.Soc)

Ringkasan

Sejak bergulirnya otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan disamping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan dalam wujud nyata dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, yang salah satunya pelayanan bidang kesehatan.

Penelitian ini bertujuan: 1) Menjelaskan alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang pada bidang kesehatan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan Pemko Tanjungpinang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk melihat gambaran belanja dan kinerja pelayanan bidang kesehatan pada Pemko Tanjungpinang. Sebagai variabel penelitian ini adalah belanja dan kinerja pelayanan bidang kesehatan Kota Tanjungpinang, dengan penilaian kinerja anggaran dan kinerja pelayanan bidang kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dengan menggunakan data sekunder tahun 2004-2008.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan peningkatan alokasi anggaran dan realisasi belanja yang *under spending*, ternyata kinerja pelayanan bidang kesehatan pada Pemko Tanjungpinang untuk beberapa indikator kinerja, seperti rasio posyandu per satuan balita; rasio rumah sakit per satuan penduduk; persentase balita gizi buruk dan angka kelangsungan hidup bayi terjadi penurunan. Namun beberapa indikator lainnya, seperti rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; rasio tenaga dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan angka usia harapan hidup terjadi peningkatan. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Bintan dan Nasional, ternyata Kinerja pelayanan bidang kesehatan pada Pemko Tanjungpinang lebih baik, namun lebih buruk dibandingkan Kota Batam.

Kata kunci: Anggaran belanja, indikator kinerja pelayanan bidang kesehatan, kinerja pelayanan bidang kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, 2002).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2007). Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menjadi landasan otonomi daerah di jelaskan lebih jauh bahwa "Kewenangan otonomi luas meliputi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi".

Dan disamping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan dalam wujud nyata dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistim jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi daerah beserta aturan aturan pelaksanaannya.

Untuk melihat apakah pemerintah daerah berhasil atau gagal melaksanakan otonomi daerah, maka perlu diadakan penilaian atas pencapaian kinerja baik dari sisi anggaran belanja maupun dari sisi pelayanannya. Penilaian sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan pelayanannya hanya bisa dilakukan jika terdapat alat ukur yang sesuai dengan tugas yang diberikan atau misi yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

KotaTanjungpinang terbentuk bersamaan dengan tahun pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu tanggal 21 juni 2001 yang mana sebelumnya berstatus Kotif Tanjungpinang. Dengan berubahnya status ini, maka kota Tanjungpinang menjalankan fungsi serta kewenangan sama dengan kabupaten atau kota lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Kehidupan masyarakat kota Tanjungpinang memiliki ciri khas masyarakat Wilayah Kepulauan dengan beragam penduduk yang cukup heterogen. Hal ini bukanlah merupakan suatu keanehan jika dilihat dari letak geografis kota

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisa hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Persentase alokasi belanja pemda untuk bidang kesehatan masih relatif rendah, yaitu hanya rata-rata sebesar 8,15% per tahun untuk tahun anggaran 2004 - 2008 dari total belanja pemda(untuk seluruh belanja bidang kesehatan) dan 3,61% per tahun(dari total belanja pemda diluar belanja gaji pegawai). Alokasi belanja ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Bintan dan kota Batam.
2. Daya serap anggaran belanja bidang kesehatan kota Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2004 - 2008 rata-rata sebesar 88,73% per tahun(untuk seluruh belanja) dan sebesar 89,69% per tahun(untuk belanja diluar gaji pegawai).
3. Persentase Alokasi belanja langsung pendukung program dan kegiatan lebih rendah dari pada rata-rata alokasi belanja tidak langsung yang tidak berkaitan dengan program dan kegiatan. Rata-rata persentase alokasi belanja langsung pendukung program dan kegiatan kota Tanjungpinang sebesar 44,63% per tahun dari total anggaran belanja bidang kesehatan. Sementara untuk belanja tidak langsung rata-rata sebesar 55,37% per tahun dai total belanja bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nur Nunuy. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Predana Madia Group, Jakarta, 2009.
- Ahmad, Laode Sukarna; Budiningsih, Nanas & Riyanto, Sigit. 2006. *Analisis Kesiapan Dinas Kesehatan Dalam mengalokasikan Anggaran Kesehatan Pada Era Desentralisasi*, <http://www.jmpk-online.net/files/02-laode.pdf>. Di download tanggal 19 Maret 2009
- Andrew, Steer 2005. *Analisis Pengeluaran Publik Papua Sebuah Tinjauan Umum*, WorldBankPublication. <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=86051> 19 Nopember 2009
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Yogyakarta, 2006.
- Fatimah. *Analisis Kebijakan Belanja dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh*. Thesis, 2009.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Woro Theresia. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2, STIM YPKN, Yogyakarta, 2007
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.
- Nodirwan, Deddi. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Prasojo, Eko; Kurniawan, Teguh & Hasan, Azwar 2005. *Efisiensi Anggaran Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi di Kabupaten Jember*, <http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdf/7empirikprasojo%20dkkefisiensi%20anggaran.pdf>. 26 Desember 09
- Ritonga, Taufiq Irwan. *Perncaaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta, 2009
- Safitri, Audia. *Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimum Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Tanah datar*. Tesis, 2006.